



## Herry Zudianto Kepala Pelayan Warga

**Dia bisa disebut sebagai satu dari tak banyak pemimpin yang relatif bekerja sungguh-sungguh membangun daerahnya. Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto juga berusaha menjauhkan diri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.**

OLEH MOHAMAD FINAL DAENG

**P**ria kurus berkecamata tebal itu memimpin Yogyakarta dalam sembilan tahun terakhir. Selama itu pula, banyak terobosan dan kebijakan yang dihasilkan untuk kemajuan Yogyakarta.

Soal integritas, sejauh ini tak ada yang menyangsikan saat Herry dianugerahi penghargaan Bung Hatta Anti-corruption Award pada Oktober 2010. Penghargaan itu hanya satu dari setidaknya 58 penghargaan tingkat nasional atas prestasinya selama memimpin Yogyakarta.

"Saya sering dibilang wali kota bodoh," katanya suatu malam pada awal tahun 2011 di rumah pribadinya di Yogya. "Bodoh" karena ia dikenal tak pernah memanfaatkan jabatan, kekuasaan, dan kesempatan untuk keuntungan pribadi. Godaan yang banyak terbukti sulit dielakkan sebagian orang dengan posisi seperti Herry.

Niatnya saat pertama mencalonkan diri menjadi wali kota pada tahun 2001 seolah sudah membantu. Ia menyebut telah mewakafkan dirinya untuk Yogyakarta. Seperti layaknya orang yang mewakafkan tanah untuk kepentingan umum, tak ada motivasi memetik keuntungan dari apa yang

diwakafkan.

Soal duit, pengila sepak bola ini sudah lebih dari berkecukupan, jauh sebelum ia menjabat wali kota. Latar belakangnya sebagai pengusaha batik dan beberapa bisnis ritel dirasakannya mencukupi. Selama menjadi wali kota, pengelolaan semua bisnis itu diserahkan sepenuhnya kepada istrinya, Dyah Suminar.

**Gelisah**

Berawal dari kegelisahannya pada kondisi Kota Yogya yang gelap gulita pada malam hari, Herry memupuk obsesi menjadi pemimpin pada tahun 2001. Saat itu, penerangan jalan di Yogya relatif masih minim. Kondisi ini juga terjadi di jantung kota, seperti di Jalan Malioboro.

"Dulu sempat ada lelucon,

kalaupun kita diculik sambil ditutup mata, ketika mata dibuka banyak gapura, berarti kita ada di Bali. Kalau penutup mata sudah dibuka tapi masih gelap, berarti kita di Yogya," ceritanya sambil terkekeh.

Hanya butuh tiga tahun bagi Herry mewujudkan impian membuat Yogya terang benderang. Setelah itu, semangat "menerangi" dia alihkan pada aspek lain, yaitu birokrasi yang dikeluhkan banyak warga.

Problem terbesar adalah kultur birokrasi pemerintah yang "menyakralkan" kekuasaan dan jabatan. Problem itulah yang dinilai Herry menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Desakralisasi birokrasi lalu dia lakukan dengan mengubah mentalitas birokrat dari penguasa menjadi pelayan masyarakat. Herry juga memosisikan dirinya sebagai kepala pelayan masyarakat.

"Kalau rakyat tidak percaya, bagaimana pembangunan bisa berjalan baik? Saya percaya partisipasi aktif masyarakat akan berdampak signifikan dan positif bagi pembangunan," katanya. Ia menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akses partisipasi masyarakat dibuka lebar untuk kritik, informasi, dan keluhan.

Berbagai layanan pendukung hal itu juga dibuka, dan di antaranya menjadi percontohan nasional, seperti Unit Pengolahan Informasi dan Keluhan, serta

Dih

Ter



KOMPAS/CHAWAN H PRABOWO



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 25 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005